

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, 2019, *Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Perlindungan WNI dan BHI 2019*, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
- Ford, Michele, *et al.*, 2012, *Labour Migration and Human Trafficking: An Introduction*. In Willem van Schendel, Lenore Lyons, Michele Ford (Eds.), *Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia: Critical Perspectives*, (pp 1-22), Routledge, London.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*”, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *et al.*, 2019, *Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Jakarta.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, IOM, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2019, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surtees, Rebecca, *et al.*, 2021, *Perlindungan dan Bantuan bagi Korban Perdagangan Orang*, Nexus Institute, Washington, D.C.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Abdullah, Rahmat Hi, “Tinjauan Viktimologis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 22, No. 01, Oktober 2019.
- Adudu, Rajwa Raidha, *et al.*, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 3, 2022.

- Anggraini, Yayuk, “‘Pengantin Pesanan’ sebagai Arena Perlawanan”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Eddyono, Sri Wiyanti, “Perempuan Pekerja Migran Non-Reguler: Konflik Hukum dalam Pengaturan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 4, Februari 2021.
- Farida, Elfia, “Implementasi prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 4, Oktober 2011.
- Farrell, Amy, *et al.*, “Policing Human Trafficking: Cultural Blindness and Organizational Barriers”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 653, Mei 2014.
- Haryaningsih, Sri, *et al.*, “Aktualisasi Pemerintah dalam Pengawasan Perkawinan Kontrak di Provinsi Kalimantan Barat”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Husnah, Wabila, *et al.*, “Perempuan Indonesia dalam Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Pengantin Pesanan ke Tiongkok: Perspektif Interseksionalitas dan Otonomi Relasional”, *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Kamea, Herlien C., “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, Februari 2016.
- Karuniawati, Ika Paramita, “Penegakan Hukum di Indonesia terhadap Masalah ‘Mail Order Bride’ (Study atas Penyelesaian Masalah Kawin Pesanan di Nunukan, Kalimantan Timur)”, *Mimbar Keadilan*, Mei 2014.
- Kurniawidyaning, Berliana Nabilah, *et al.*, “Pemidanaan Penggunaan Pengantin Pesanan Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 4, November 2021.
- Meng, Eddy, “Mail-Order Brides: Gilded Prostitution and the Legal Response”, *University of Michigan Journal of Law Reform*, Vol. 28, No. 1, 1997.
- Ningrum, Nur Fatimah, “Implementasi Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) oleh Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Perempuan di Indonesia Tahun 2007-2018”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 7, Edisi 2, Juli – Desember 2020.
- Novianti, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2014.
- Nugroho, Okky Chahyo, “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 4, Desember 2018.

- Rianawati, *et al.*, “Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan di Perbatasan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat”, *Matra Pembaruan*, Vol. 3, No. 2, November, 2019.
- Sabirin, “Perdagangan Perempuan dengan Dalih Perkawinan”, *Raheema*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Salsa, Shidqi Noer, “Kejahatan Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi dan Pidanaan”, *Jurnal Law Retrieval*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.
- Syamsuddin, “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban”, *Sosio Informa*, Vol. 6, No. 01, April 2020.
- Wahyuningsih, Sri, *et al.*, “Pola Pengantin Pesanan (Mail Ordered Bride) sebagai Salah Satu Bentuk Spesifik Trafiking di Kalimantan Barat”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, Vol. 19, No. 1, Februari 2007.
- Wulandari, Cahya, *et al.*, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3, September – Desember 2014.
- AS, Yenny, *et al.*, “The Handling of Human Trafficking with Mail Order Bride Mode in West Kalimantan”, *International Journal of Law Reconstruction*, Vol. 4, No. 2, September 2020.
- Yulianti, *et.al.*, “Perdagangan (Trafficking) Perempuan Etnis Tionghoa melalui Perkawinan Pesanan di Kota Singkawang”, *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*, Vol. 1, No. 0001, 2013.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Arfiani, Della, 2018, *Upaya Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menangani Kasus Pengantin Pesanan Singkawang Tahun 2011-2013*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat.
- Eddyono, Sri Wiyanti, *et al.*, 2020, *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan: Studi pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan*, Hasil Penelitian, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Jakarta.
- Karini, Diah Ayu, 2020, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) dengan Modus Pengantin Pesanan dalam Kajian Fiqih Jinayah (Studi Kasus di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat)*”, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, Surabaya.

D. Internet

- Antara News, “LPSK Terima 147 Permohonan Kasus Perdagangan Orang pada 2021”, <https://www.antaranews.com/berita/2670669/lpsk-terima-147-permohonan-kasus-perdagangan-orang-pada-2021>, diakses 27 Mei 2022.
- Antara News, “LPSK: Jumlah Restitusi Korban TPPO Dikabulkan Hakim Kurang 12 Persen”, <https://www.antaranews.com/berita/2652377/lpsk-jumlah-restitusi-korban-tpo-dikabulkan-hakim-kurang-12-persen>, diakses 17 Juni 2022.
- BBC News Indonesia, “Pengantin Pesanan China, Potret Buram yang Menggambarkan Kemiskinan dan Janji ‘Hidup Enak’ di Negeri Orang”, <https://www.bbc.com/indonesia/media-51217574>, diakses 31 Januari 2022.
- Center for Area Studies Indonesia Institute of Sciences (P2W-LIPI), “Sisi Kelam Pengalaman Penyintas Pengantin Pesanan”, <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/news/sisi-kelam-pengalaman-penyintas-pengantin-pesanan.html>, diakses 10 Juni 2022.
- Consulate General of the Republic of Indonesia, in Hong Kong, Special Administrative Region of the People’s Republic of China, “Protection of Indonesian Citizens”, https://kemlu.go.id/hongkong/en/pages/layanan_perlindungan_wni/224/about-service, diakses 23 Juni 2022.
- Detik News, “Peneliti LIPI Jelaskan Kendala Pelaku Pengantin Pesanan China Sulit Ditindak”, <https://news.detik.com/berita/d-5079245/peneliti-lipi-jelaskan-kendala-pelaku-pengantin-pesanan-china-sulit-ditindak/2>, diakses 31 Mei 2022.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta, “Antara Pandemi, Pelambatan Ekonomi, dan Human Trafficking”, <http://www.dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/616-antara-pandemi-pelambatan-ekonomi-dan-human-trafficking>, diakses 30 Januari 2022.
- GATRAcom, “Beda Pendapat Indonesia-Cina Soal Pengantin Pesanan”, <https://www.gatra.com/news-435541-internasional-beda-pendapat-indonesia-cina-soal-pengantin-pesanan.html>, diakses 31 Mei 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses 28 Januari 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses 28 Januari 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narasumber>, diakses 1 Februari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/responden>, diakses 1 Februari 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/301/indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia>, diakses 27 November 2021.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Modus TPPO Sentuh Kaum Milenial, Menteri Yohana Imbau Gencaran Literasi Digital”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2186/modus-tppo-sentuh-kaum-milenial-menteri-yohana-imbau-gencaran-literasi-digital>, diakses 21 Juni 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/ca5bf-pedoman-teknis-untuk-gugus-tugas-tppo.pdf>, diakses 25 Januari 2021.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1166.1613744528.pdf>, diakses 23 November 2021.

Kompas, “Kementerian PPPA Temukan Indikasi Perdagangan Orang dengan Modus Pengantin Pesanan”, <https://www.kompas.tv/article/256756/kementerian-pppa-temukan-indikasi-perdagangan-orang-dengan-modus-pengantin-pesanan>, diakses 16 Februari 2022.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, “Paspur dan SPLP”, https://kemlu.go.id/shanghai/id/pages/paspur_dan_splp/598/about-service, diakses 23 Juni 2022.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Laporan Tahunan LPSK 2020”, <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/ca4874ea547354597404d6a151415197.pdf>, diakses 25 Januari 2022.

Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan”, https://www.bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf, diakses 28 Januari 2022.

Republika, “Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020”, <https://www.republika.co.id/berita/qr7v1l330/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-naik-pada-2020>, diakses 23 November 2021.

Republika, “Menlu: China Beda Pandangan Soal Kasus Pengantin Pesanan”, <https://www.republika.co.id/berita/puw1pr382/menlu-china-beda-pandangan-soal-kasus-pengantin-pesanan>, diakses 31 Mei 2022.

- Serikat Buruh Migran Indonesia, “Laporan Tahunan 2020: Mengungkap Realita Perempuan Korban Trafficking Pengantin Pesanan”, <https://sbmi.or.id/laporan-tahunan-2020-mengungkap-realita-perempuan-korban-trafficking-pengantin-pesanan/>, diakses 3 Desember 2021.
- Serikat Buruh Migran Indoensia, “CATAHU Komnas Perempuan 2020 Mengungkap Modus Pengantin Pesanan”, <https://sbmi.or.id/catahu-komnas-perempuan-2020-mengungkap-modus-pengantin-pesanan/>, diakses 19 Januari 2022.
- Serikat Buruh Migran Indonesia, “Pendekatan Komprehensif dalam Tangani Korban Pengantin Pesanan”, <https://sbmi.or.id/pemerintah-harus-membuat-pendekatan-komperhensif-dalam-tppo-bermodus-pengantin-pesanan/>, diakses 17 Juni 2022.
- Suara, “SBMI Bongkar Tren Kasus TKI Jadi Korban Pengantin Pesanan”, <https://www.suara.com/news/2020/07/30/184310/sbmi-bongkar-tren-kasus-tki-jadi-korban-pengantin-pesanan?page=all>, diakses 25 November 2021.
- Suara, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia Capai 204,7 Juta di Tahun 2022”, <https://www.suara.com/tekno/2022/02/21/163932/jumlah-pengguna-internet-indonesia-capai-2047-juta-di-tahun-2022>, diakses 21 Juni 2022.
- UNAIR News, “Perdagangan Manusia dalam Persepsi Masyarakat”, <http://news.unair.ac.id/2020/07/12/perdagangan-manusia-dalam-persepsi-masyarakat>, diakses 25 November 2021.
- United Nations, “Report of the Fourth World on Conference on Women”, <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf>, diakses 2 Desember 2021.
- United Nations Human Rights, “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx>, diakses 23 Februari 2022.
- United Nations on Office and Drugs, “Good Use and Abuse: The Role of Technology in Human Trafficking”, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2021/the-role-of-technology-in-human-trafficking.html>, diakses 21 Juni 2022.

E. Peraturan Perundang-undangan

- ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.*
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.*
- Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*

Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167).

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sag

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Sag